

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, intensitas penggunaan istilah “Indo-Pasifik” semakin sering ditemui dalam berbagai diskusi strategis di kawasan Australia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Selama 10 tahun terakhir, istilah “Indo-Pasifik” mulai digunakan dalam studi geopolitik menggantikan istilah yang dikenal sebelumnya yaitu “Asia Pasifik” dengan perbedaan mendasar penekanan pada wilayah yang berkaitan dengan perairan. Konsep Indo-Pasifik ini seringkali didefinisikan sebagai sebuah konsep strategis terintegrasi yang mampu menangkap pergeseran kekuasaan dan pengaruh dari barat ke timur, konsep ini juga telah mendominasi berbagai perdebatan dan diskusi strategis di Kawasan. Terminologi Indo-Pasifik sebagai konstruksi geopolitik muncul dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada tahun 2007 tentang Hindia dan Pasifik sebagai lautan kebebasan dan kemakmuran (*Free and Open Indo-Pacific/FOIP*) (Abe, 2007). Selain itu, kebijakan luar negeri Tiongkok dan India yang berorientasi ke laut serta visi Amerika Serikat yang tidak dapat memisahkan India dari arsitektur keamanannya telah mendorong AS untuk mulai mengembangkan konsep Indo-Pasifiknya sendiri (Yoshihara, 2013, pp. 90-103).

Gagasan Indo-Pasifik sendiri bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, tetapi baru mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir (Montratama, 2016, pp. 36-61). Secara sederhana, Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep yang menjadi penghubung antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik sebagai suatu wilayah maritim yang berimplikasi terhadap pembentukan kebijakan luar negeri, pertahanan, serta ekonomi yang sesuai. Sebagai wilayah yang menjadi titik pertemuan antar kedua Samudra ini, Indonesia harus mampu untuk memainkan peran utamanya dalam Kerjasama geopolitik (Medcalf, 2017).

Secara geografis, wilayah Indo-Pasifik ini merujuk pada kawasan negara-negara yang membentang dari bagian timur samudera hindia ke samudera pasifik bagian barat, dan terhubung dengan selat malaka. Indo-Pasifik juga telah menjadi pusat kegiatan geopolitik maritim, perdagangan, keamanan serta lingkungan (Passarelli, 2014). Indo-Pasifik juga merupakan kawasan yang berada di persimpangan perdagangan internasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pusat geopolitik kawasan, hal ini terepresentasi melalui kehadiran negara-negara besar yang ada seperti: Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Australia, serta negara-negara ASEAN.

Kehadiran negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, telah membawa berbagai dampak bagi negara kawasan termasuk Indonesia. Selain mendatangkan keuntungan dengan bertambahnya tingkat ekonomi, datang pula ancaman terhadap stabilitas keamanan pada kawasan. Pada dasarnya ancaman bersama di kawasan Indo-Pasifik tidak jauh dari sengketa batas wilayah dan pada keamanan maritim (Purnama, 2017). Jalur perdagangan laut yang digunakan oleh banyak negara menghadirkan ancaman laut. Masuknya imigran gelap, penyelundupan senjata, peredaran narkoba, *illegal fishing* hingga terorisme merupakan contoh ancaman laut.

Menurut Nurhasya (2018), beberapa perairan krusial seperti Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Laut Andaman menjadi pusaran panas di kawasan Indo-Pasifik. Lingkup kontestasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok nampak kian jelas pada konflik di kawasan LTS. Tiongkok merupakan alasan kuat keberadaan Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*) di kawasan Indo-Pasifik. Pengaturan Quad dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka adalah semacam kompetisi halus melawan inisiatif *Belt Road Initiative* (BRI) Tiongkok (Saha, 2018). Wilayah ini, bagaimanapun, tetap menjadi pilar penting bagi BRI Tiongkok. Pangsa kekuasaan Tiongkok luas di wilayah tersebut, terlebih terdapat salah satu titik kekuasaannya yang selalu menjadi sengketa yaitu LTS. Selain itu dominasi militer Tiongkok seperti di LTS dan Laut Timur dianggap telah menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan. Saat ini stabilitas keamanan berpotensi akan meningkat. Perebutan kekuasaan serta pengaruh oleh para

aktor yang berkontestasi akan mengganggu perdamaian di kawasan. Adanya kontestasi antara AS dan Tiongkok menjadi salah satu fitur utama yang mewarnai dinamika di Indo-Pasifik.

Rivalitas AS-Tiongkok terjadi karena adanya upaya perebutan hegemoni di kawasan, di mana RRT berusaha menerapkan program BRI (*Belt Road Initiative*) nya, yang merupakan refleksi dari kebijakan Presiden Xi terkait pembangunan infrastruktur globalnya. Isu ini tentu saja tidak hanya melibatkan kedua negara yang bertikai, tetapi juga adanya keterlibatan beberapa negara lain yang berupaya untuk mendukung kepentingannya masing-masing dengan ikut membantu AS maupun Tiongkok dalam memenangkan kompetisi geopolitik yang terjadi di kawasan.

Rivalitas AS-Tiongkok ini juga berimplikasi terhadap beberapa fenomena penting terkait perubahan dan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, yaitu (a) *US Pivot to Asia* (Shambaugh, 2018), kebijakan *One Belt One Road (OBOR)* yang kemudian berubah menjadi *Belt and Road Initiatives (BRI)* dari RRT (Cai, 2017), serta konsep *Free and Open Indo Pacific (FOIP)* dari Jepang (Mofa Japan, 2017). *Pivot to Asia*, BRI, dan FOIP merupakan strategi geopolitik yang implementasinya mencakup wilayah Indo-Pasifik di mana Indonesia berada di tengah-tengahnya. Oleh karena itu strategi geopolitik yang berlawanan antara BRI (RRT) dengan FOIP dan *Pivot to Asia* (AS) berpotensi, bahkan dapat dipastikan memiliki dampak terhadap kepentingan nasional serta peran Indonesia di kawasan (Radjendra, 2022).

Fenomena lainnya yang merupakan manifestasi dari kompetisi serta bipolaritas antara AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yaitu sengketa di LTS. Meskipun dalam sengketa sebenarnya beberapa negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan, akan tetapi juga melibatkan AS serta aliansinya. Keterlibatan AS dalam konteks ini yaitu dalam bentuk operasi kebebasan bernavigasi (*Freedom of Navigation Operation / FONOP*) serta Latihan Bersama dengan negara lain di kawasan LTS (Berkofsky, 2018).

Selain itu, keputusan AS, Inggris dan Australia membentuk Pakta Pertahanan AUKUS juga menyebabkan peningkatan polarisasi wilayah antara AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik semakin memanas. Pengembangan dan pengerahan kapal selam bertenaga nuklir ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut telah menarik garis dan menangkai langkah agresif yang dilakukan oleh Tiongkok. Keputusan AUKUS memperkuat kesan kawasan yang semakin dibedah oleh tarik-menarik geopolitik. Pembentukan AUKUS merupakan tanggapan strategis terhadap kemampuan militer Tiongkok yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik (Sutanto & et.al, 2022). Selain itu, pembentukan AUKUS juga secara eksplisit menunjukkan semakin seriusnya negara-negara di luar kawasan, seperti Inggris dalam keterlibatannya secara langsung pada kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik (Septiari, 2021).



Gambar 1.1: Tata Letak dan nilai strategis Indo-Pasifik bagi Negara  
Sumber: Gopalswamy (2013)

Perubahan dan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam kompetisi di LTS, memiliki dampak langsung terhadap Indonesia. Meskipun Indonesia bukan salah satu negara *claimed state*, akan tetapi secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan LTS yang merupakan salah satu *hot spot* di mana kedua kekuatan tersebut saling berebut pengaruh dan juga saling unjuk kekuatan militer. Selain itu, Tiongkok juga memasukkan wilayah Indonesia ke dalam wilayah periferi strategi militernya, yaitu ke dalam *the First Island Chain* serta *the Second Island Chain*, dimana pulau-pulau terluar di bibir Samudra Pasifik dapat menjadi wilayah yang diperebutkan sebagai pangkalan laut maupun udara sebagai bagian dari lompatan serangan seperti Pulau Morotai yang pernah digunakan oleh AS untuk menyerang daratan Jepang dari basis operasi Angkatan Laut AS di Darwin, Australia (Erickson & Wuthnow, 2016).

Di tengah eskalasi konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang menjadi bagian dari kawasan Indo-Pasifik dan maraknya kembali berbagai aktivitas perompakan maritim di Asia Tenggara, doktrin Poros Maritim Global (PMD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tampaknya semakin penting.

**Tabel 1.1 Insiden Perompakan di Asia Tenggara**

Tahun	Indonesia	Selat Malaka	Malaysia	Filipina	Selat Singapura	Thailand	Total Akhir Per Tahun
2014	100	1	24	6	8	2	141
2015	108	5	13	11	9	1	147
2016	49	0	7	10	2	0	68
2017	46	0	7	22	4	0	76
2018	36	0	11	10	3	0	60

Sumber: ICC International Maritime Bureau (IMB) Piracy and Armed Robbery Against Ships Report (2021)

Konsep PMD ini bukan hanya menjadi visi dari pembangunan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetapi juga telah dijadikan

sebagai rujukan atas komitmen bersama oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)* atau cara pandang ASEAN dalam posisinya di kawasan Indo-Pasifik, dalam KTT Asia Timur/East Asia Summit 2014 di Naypydaw-Myanmar dan pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok, Thailand (Syarifudin & et.al, 2021).

Konsep PMD yang dicanangkan Presiden Widodo, menegaskan urgensi diplomasi maritim sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa maritim territorial dengan negara tetangga, serta merupakan upaya untuk mereduksi ketegangan maritim karena adanya polarisasi antar negara *super power* di kawasan. Ia juga menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pada KTT Asia Timur November 2014, Jokowi lebih lanjut mengelaborasi doktrin PMD ini dengan mencantumkan lima pilar poros maritim, yaitu (1) kebangkitan budaya maritim Indonesia dan akhirnya, identitas nusantara; (2) pembangunan kelautan dan perikanan; (3) peningkatan ekonomi maritim; (4) diplomasi maritim untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal dan ancaman keamanan lainnya; dan (5) meningkatkan pertahanan maritim Indonesia (Agastia & Perwita, 2015, p. 36).

Konsepsi Poros Maritim Dunia merefleksikan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga kebijakan luar negeri dan pertahanan yang diambil akan dititikberatkan pada ranah maritim. Pendekatan dalam politik luar negeri Presiden Widodo menegaskan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang kuat, dengan mengutamakan peran diplomasi. Sehingga kerja sama maritim merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan dan pengembangan arsitektur di kawasan ini (Medcalf, 2017).

Konsep PMD sendiri telah direfleksikan ke dalam Visi Kelautan Indonesia, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang berdaulat, mandiri, maju, dan kuat serta dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun keamanan dan perdamaian baik secara regional maupun global sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia). Pada tahun 2017, disusunnya dokumen

nasional mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia yang termanifestasi dalam Perpres Nomor 16 tahun 2017 menjelaskan mengenai 7 pilar dalam kebijakan kelautan Indonesia. Salah satu pilar utamanya yaitu mengenai Diplomasi maritim yang terdapat pada pilar ke-7. Lebih lanjut, diplomasi maritim juga merupakan bagian dari program prioritas dalam Perpres RI No. 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Diplomasi maritim Indonesia adalah bagian dari pelaksanaan polugri Indonesia yang di dalamnya mencakup berbagai aspek kelautan dalam tingkatan bilateral, regional/kawasan, maupun secara global. Selain itu juga dalam pelaksanaannya, diplomasi maritim ini dilakukan oleh sipil dan militer dengan menggunakan asset/potensi laut yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yang disesuaikan dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku (Perpres No. 16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia, p. 32).

Konsepsi diplomasi maritim sebagai salah satu pilar PMD (kemudian menjadi salah satu komponen utama Kebijakan Kelautan Nasional), menjadi sangat penting dalam mengurangi ketegangan regional, mendorong pengembangan tatanan regional yang berbasis prinsip, serta menjadi ujung tombak politik luar negeri Indonesia, dan Aturan hukum internasional (*rule-based order*).

Merujuk pada teori Barry Buzan dalam bukunya, "*Region and Powers (The Structure of International Security)*", ia menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan di suatu kawasan, peran kerjasama regional antar negara sangat menentukan keberhasilan stabilitas suatu kawasan (Buzan & Waeber, 2003). Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah memprakarsai pembentukan kerja sama regional ASEAN. Negara-negara ASEAN serta negara besar lainnya menilai bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam memainkan perannya di Kawasan Regional ASEAN. Karena masih ditemukannya berbagai permasalahan keamanan khususnya di

wilayah laut territorial Indonesia, maka TNI AL memiliki peran aktif dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan memanfaatkan kerjasama negara-negara ASEAN. Salah satu upaya dalam menjalin kerjasama antar negara ASEAN adalah *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* (Dipua & et.al, 2021).

Dua per tiga wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut Asia Tenggara. Perairan territorial mempunyai ciri khas tersendiri dengan ciri khas kepulauan dan dikelilingi oleh perairan territorial negara tetangga yang kepentingannya sama atau berlawanan dengan kepentingan Indonesia. Di sisi lain, wilayah perairan Indonesia merupakan perairan strategis bagi *Sea Lane of Communication (SLOC/Jalur Komunikasi Laut)* dan *Sea Lane of Oil Trade (SLOT/Jalur Perdagangan Internasional)*, serta bersinggungan dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Tiongkok Selatan. Sehingga, memiliki kemampuan penangkalan yang bermuara pada *national resilience* (ketahanan nasional) Indonesia yang terintegrasi ke dalam *regional resilience* merupakan persiapan terwujudnya cita-cita pembentukan *ASEAN Navy* sebagai bagian *ASEAN Political-Security Community 2015*. Pada saat yang sama, perwujudan Indonesia sebagai jalur dan pusat transit perdagangan dan komunikasi global juga menjadi sebuah urgensi. Selain itu, zona strategis internasional harus diamankan dalam yurisdiksi nasional Indonesia (Selat Malaka). Urgensinya adalah mencegah internasionalisasi *area of interest* dengan menunjukkan kemampuan TNI AL dalam mengamankan perairan territorial tersebut sebagai bagian dari peran prioritas dan kontribusi regionalnya yang memiliki dampak global (Marsetio., 2014).

Peran Angkatan Laut di era globalisasi saat ini menjadi sebuah urgensi, serta merupakan refleksi dari adanya dinamika lingkungan strategis. Lahirnya kompetisi dan kerjasama antar negara dalam bidang politik, ekonomi dan militer menempatkan Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan yang memainkan peran strategis (Antariksa A. Y., 2014). Menurut UU No. 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya bahwa, pemerintah secara dini mempersiapkan keterlibatan dari seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional

lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, berlanjut dan terarah dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman (Indrawan, 2015). Di tengah dinamika ancaman kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, TNI AL memiliki tugas dan mendukung terciptanya keamanan regional dan sistem pertahanan negara melalui peran diplomasi AL. Sesuai dengan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2018, arah kebijakan Pertahanan Negara juga berpedoman pada visi kebijakan Poros Maritim Dunia (Kementerian Pertahanan RI, 2017), di mana peningkatan diplomasi maritim merupakan salah satu poin di dalam visi PMD. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman.

Dalam bukunya *Navies and Foreign Policy*, Ken Booth menjelaskan bahwa secara universal Angkatan Laut seluruh dunia memiliki peran secara universal yaitu peran yang disebut Trinitas Angkatan Laut. Peran Angkatan laut secara tidak langsung merefleksikan tujuan keamanan serta pertahanan yang dirumuskan di tingkatan tertinggi sebuah negara (Sutanto, Priyanto, & Adriyan, 2022). Peran-peran tersebut meliputi peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*), dan peran diplomasi (*diplomacy role*).

Peran Militer (*Military Role*) merupakan dasar dari esensi angkatan laut sebuah negara. Peran militer ini mencakup kemampuan angkatan laut untuk mengancam dan menggunakan kekuatan yang memberi arti pada mode tindakan lainnya. AL memperoleh dampak diplomatiknya dari persepsi tentang karakter militernya. Kemampuan militer ini dilakukan untuk mengatasi konflik dengan mengerahkan kemampuan kekuatan yang dimilikinya dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

Peran Polisionil (*Constabulary Role*) berorientasi secara internal dan eksternal. Peran ini dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional dan memelihara ketertiban di laut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

Sedangkan Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*), berkaitan dengan pengelolaan kebijakan luar negeri dari penggunaan kekuatan yang sebenarnya. Aplikasi diplomatik mendukung kebijakan negara dalam situasi tawar-menawar tertentu atau dalam hubungan internasional secara umum. Pelaksananya dilakukan dengan menggunakan kekuatan laut (*sea power*), sebagai sarana diplomasi sebagai upaya untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, peran diplomasi AL juga dirancang untuk memberikan pengaruh terhadap kepemimpinan satu atau beberapa negara baik dalam situasi damai maupun saat terjadi ketegangan maupun permusuhan (Booth K. , 2014).

Ken Booth menjelaskan mengenai fungsi dan peran angkatan laut (trinitas peran militer, kepolisian dan diplomatik) dan pemikirannya kemudian dimasukkan ke dalam doktrin resmi dari banyak kekuatan Barat. Pasca-Perang Dingin, Joseph Nye memberikan pemahaman baru tentang kekuasaan. Selain itu, beberapa praktisi angkatan laut dan akademisi seperti Mike Mullen dan Geoffrey Till melihat ide-ide lama melalui pendekatan 'pasca-modern' yang baru (Rowlands, 2018).

Pasca Perang Dingin, Diplomasi Angkatan Laut di Kawasan Asia Tenggara telah mengalami signifikansi dan intensitas yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, selama satu dekade terakhir, aktivitas yang melibatkan peran Diplomasi AL jauh lebih tinggi. Peningkatan tersebut merupakan implikasi dari adanya perluasan cakupan geografis bagi kepentingan nasional masing-masing negara Asia Tenggara, serta semakin mengedepannya konflik-konflik pada domain maritim (Ali, 2022). Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus terus menerus melakukan peningkatan diplomasi Angkatan Laut di kawasan, baik yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-

negara ASEAN maupun kekuatan ekstra kawasan. Berhubungan dengan hal di atas, maka diperlukannya penataan ulang terkait diplomasi Angkatan Laut yang selama ini dianut Indonesia sehingga dapat tercapainya pengamanan kepentingan nasional dalam lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian (Marsetio, 2014, p. 106).

Diplomasi diasumsikan sebagai sebuah instrumen komunikasi yang digunakan dalam hubungan kekuasaan untuk memajukan kepentingan aktor internasional yang terlibat. Aktor dengan kekuatan relatif tertentu akan berusaha menggunakannya, akan menjadi kontra-intuitif untuk berpikir sebaliknya. Oleh karena itu, merupakan deduksi logis bahwa kekuatan militer mungkin merupakan ceruk yang akan dieksploitasi oleh beberapa aktor untuk mencapai tujuan diplomatik (Rowlands, 2018).

Diplomasi angkatan laut adalah bagian dari diplomasi umum dan akan digunakan sebagai sarana komunikasi oleh negara-negara maritim dalam mengejar kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, negara maritim dengan kekuatan angkatan laut akan terlibat dalam diplomasi angkatan laut (Rowlands, 2018). Diplomasi Angkatan laut berada dalam bingkai kebijakan luar negeri suatu negara. Diplomasi AL juga seharusnya dituntun oleh strategi keamanan nasional (Marsetio, 2014, p. 108).

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik saat ini, TNI Angkatan Laut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam *naval diplomacy* guna mendukung kepentingan nasional. Kapal perang, khususnya kapal kombatan, merupakan aset diplomasi Angkatan Laut yang tidak ternilai, sebab mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya, seperti mobilitas dan visibilitas. Merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih proaktif di tengah kompetisi dan kerjasama kekuatan-kekuatan besar kawasan.

Di dalam UU TNI No. 34 tahun 2004, pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa: "Pelaksanaan diplomasi AL merupakan salah satu tugas pokok TNI AL sebagai upaya untuk mendukung kebijakan polugri yang telah ditetapkan oleh

pemerintah”. Maka, UU tersebut merefleksikan tugas dan legitimasi TNI AL dalam pelaksanaan diplomasi Angkatan. Sehingga melalui UU tersebut maka TNI AL memiliki legitimasi terhadap pelaksanaan Diplomasi AL. Dalam pelaksanaannya, dari 3 peran universal AL, hanya 2 peran yaitu peran militer dan polisionil yang sudah banyak dibahas serta telah memiliki institusi yang terstruktur melalui Gugus Tempur Laut (Guspurla) maupun Gugus Keamanan Laut (Guskamla) di Koarmada I, II dan III. Sementara itu, Implementasi peran diplomasi AL dilakukan oleh KRI sebagai unsur “*Showing the Flag*”, tidak terstruktur, tetapi dikemas dalam bentuk kegiatan lain, seperti muhibah, *passing exercise*, kehadiran di kawasan tertentu dan bahkan ada upaya lebih luas dari TNI AL untuk menjadi Angkatan Laut kelas Dunia (*World Clas Navy*). Mengingat pentingnya diplomasi AL dan implementasinya, sudah saatnya dikembangkan dalam struktur organisasi tersendiri yang diawaki pada masa damai dan masa perang (Sirmareza, 2017). *Naval diplomacy* yg dilakukan oleh Indonesia merupakan refleksi dari kepentingan nasional Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dunia.

Dalam rangka mendukung politik luar negeri Indonesia, Penggunaan kekuatan laut tidak dilakukan dengan penggunaan senjata, akan tetapi merupakan suatu isyarat atau pesan yang mencakup berbagai upaya untuk (a) Mengkomunikasikan niat suatu negara, (b) Menegosiasikan masalah bilateral dua negara, serta (c) Menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara.

Sementara itu, dalam rangka untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, Diplomasi Angkatan Laut di Indonesia telah dipraktekkan sejak akhir 1950-an. Merujuk pada penjelasan Ken Booth, bahwa diplomasi merupakan satu dari tiga peran universal yang dilakukan oleh TNI AL, implementasinya sendiri telah dilakukan sejak berbentuk BKR Laut di tahun 1945 hingga kini pada tataran internasional. Terdapat berbagai negara yang memberikan apresiasi terhadap Diplomasi TNI Angkatan Laut. Terakhir kali, Angkatan Laut Belanda memberikan penghargaan berupa *Awards the Medal of Honour Prins Hendrik* (Marsetio., 2014, p. 111).

Menurut Marsetio (2014), TNI Angkatan Laut Indonesia telah beberapa kali berhasil melaksanakan diplomasi-diplomasi yang berhasil secara gemilang. Beberapa diplomasi damai TNI Angkatan Laut tersebut telah berhasil mengangkat nama bangsa di percaturan politik dan diplomasi di tingkat regional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah misi *United Nation Interim Force in Lebanon's Maritime Task Force (UNIFIL MTF)*, Pembebasan MV. Sinar Kudus di Somalia, Pelayaran Muhibah KRI Dewa Ruci, Penanganan Pengungsi Pulau Galang dan Pengusiran kapal fery Lusitania Express.

Berdasarkan latar belakang di atas, perkembangan dinamika di kawasan Indo-Pasifik telah membawa berbagai ancaman yang semakin kompleks, sehingga untuk mendukung sistem pertahanan negara Indonesia dibutuhkan upaya-upaya penguatan melalui Peran Diplomasi Pertahanan Maritim yang merupakan salah satu domain dari TNI Angkatan Laut Indonesia serta berbagai Institusi maritim lainnya. TNI Angkatan Laut Indonesia memiliki peran sebagai agen pertahanan negara dengan tugasnya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Meskipun Implementasi dari diplomasi AL telah berjalan dengan baik akan tetapi, kompleksitas keamanan regional dan dinamika di Kawasan Indo-Pasifik yang terefleksi melalui rivalitas Tiongkok-AS, QUAD, serta AUKUS baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi ancaman bagi pertahanan negara Indonesia. Dalam penelitian ini akan dielaborasi lebih lanjut mengenai penguatan peran diplomasi Angkatan Laut Indonesia yang bertujuan untuk dapat menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sehingga akan mereduksi dinamika ancaman dan mewujudkan sistem pertahanan negara Indonesia yang lebih kuat.

## **1.2. Fokus dan sub fokus**

### **1.2.1 Fokus**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Penentuan fokus penelitian dilakukan guna memberikan batasan atas masalah yang akan diteliti. Pembatasan dalam penelitian didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor keterbatasan peneliti dari segi biaya, waktu, jarak, dan tenaga.

Merujuk pada peran universal AL menurut Ken Booth yang disebut Trinitas Angkatan Laut, yang meliputi peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*), dan peran diplomasi (*diplomacy role*). Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap peran diplomasi AL. Penelitian ini akan mengeksplorasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapai Penguatan Peran TNI Angkatan Laut di kawasan Indo-Pasifik dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara.

### **1.2.2 Sub Fokus**

Perumusan subfokus penelitian dilakukan untuk menjelaskan fokus penelitian dari sudut tinjauan tertentu. Dari fokus penelitian diatas dalam penelitian ini dirumuskan subfokus penelitian antara lain:

1. Implementasi Peran Diplomasi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.
2. Strategi yang digunakan untuk memperkuat peran diplomasi TNI Angkatan Laut Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dalam mendukung sistem pertahanan negara.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, maka dapat dipahami bahwa saat ini kawasan Indo-Pasifik memainkan peran yang sangat signifikan khususnya dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan

Internasional. Indonesia yang merupakan negara maritim terbesar di kawasan memiliki peran dan kepentingan untuk dapat memaksimalkan potensi lautan. Letak Indonesia yang sangat strategis berimplikasi terhadap pentingnya bagi Indonesia untuk memaksimalkan kekuatan Angkatan Laut yang dimiliki melalui *Naval Diplomasi*. Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah Penguatan Peran TNI AL di Kawasan Indo-Pasifik dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peran Diplomasi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika ancaman di Kawasan Indo-Pasifik?
2. Bagaimana Strategi yang digunakan untuk memperkuat peran diplomasi TNI Angkatan Laut di kawasan Indo-Pasifik dalam mendukung sistem pertahanan negara?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulisan adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang disusun penulis sehingga dengan tulisan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan tersebut. Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis implementasi Diplomasi TNI AL dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.
- b. Menganalisis Strategi yang digunakan untuk memperkuat peran diplomasi TNI Angkatan Laut Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dalam mendukung sistem pertahanan negara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki dua manfaat yaitu: (a) Manfaat teoritis dan (b) Manfaat praktis. Diharapkan dari kedua manfaat ini dapat saling melengkapi dari sisi literasi informasi dan pelaksanaan praktis di lapangan.

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk mendukung, meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan serta memperkaya referensi pustaka bidang ilmu pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait strategi pertahanan laut. Dalam implementasi strategi pertahanan laut dibutuhkan kekuatan laut (*sea power*), yang didukung oleh peran diplomasi Angkatan Laut. Secara teoritis, penggunaan konsep diplomasi pertahanan maritim juga dibutuhkan untuk menghadapi ancaman yang ada di kawasan Indo-Pasifik baik militer dan non-militer yang tujuan akhirnya adalah untuk mendukung sistem pertahanan negara Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perumus kebijakan serta memberikan manfaat praktis terhadap:

1. Bagi Kementerian Pertahanan RI, Memberikan masukan berupa upaya yang dapat dilakakukan dalam rangka implementasi kerja sama militer di kawasan Indo-Pasifik guna mendukung sistem pertahanan negara, serta sebagai bahan rujukan dalam pembuatan kebijakan dan bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama pertahanan.
2. Bagi Kementerian Luar Negeri, yaitu sebagai input dalam menyelenggarakan kerjasama maritim serta menghadapi dinamika di kawasan Indo-Pasifik.
3. Bagi TNI Angkatan Laut, yaitu sebagai input untuk terciptanya penyelenggaraan diplomasi Angkatan Laut yang lebih efektif dan optimal. Diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari Strategi Maritim sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif.
4. Bagi Universitas Pertahanan RI, sebagai bahan kajian akademis dan literatur yang dapat mendukung khasanah ilmu pertahanan khususnya peran diplomasi Angkatan Laut dalam lingkup regional.